

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Islam masih dicitrakan sebagai agama yang dekat dengan keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Pencitraan tersebut sesungguhnya bersumber dari ketidakmampuan sebagian besar umat Islam dalam memahami secara utuh dan kritis tata nilai kehidupan yang terkandung dalam ajaran Islam dan mentransformasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Umat Islam masih kalah serius dibandingkan umat nonmuslim. Persoalannya tidak hanya pada tataran institusional negara, melainkan juga pada tingkat kesadaran masyarakat muslim.

Negara-negara yang berpenduduk muslim tersebar di berbagai wilayah, dan umumnya terkonsentrasi di Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa, Eurasia, Asia Selatan dan Timur, dan sub-Sahara Afrika. Kondisi penduduk di 48 negara dari 165 negara sedikitnya terdiri atas 50 persen muslim. Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki dunia Islam umumnya juga amat potensial. Negara-negara Muslim memiliki 70 persen sumber energi di dunia dan 40 persen bahan baku ekspor. Dari 25 negara produsen minyak terbesar di dunia yang menguasai kira-kira 91,2 persen produksi minyak dunia, 14 negara diantaranya adalah negara Muslim dengan kontribusi 42,9 persen produksi minyak dunia. Cadangan minyak dunia terbesar juga berada di 5 (lima) negara muslim (Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Emirat Arab) dari 25 negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang kira-kira menguasai 96,5 persen cadangan minyak dunia, dimana 14 negara diantaranya juga negara Muslim dengan kontribusi 73,6 persen cadangan minyak dunia, yang masih ditambah lagi dengan cadangan gas alamnya yang mencapai 50,1 persen cadangan gas alam dunia (*diolah dari Statistik OPEC, 2005*).

Potensi besar sesuai dengan paparan tersebut di atas yang dimiliki negara-negara Muslim tidak diikuti dengan kinerja perekonomian yang membaik (Setiawan, 2006). Terbukti *Gross Domestic Product* (GDP) negara Muslim baru sekitar 8 persen. Menurut *CIA the World Factbook*, Produk Domestik Bruto

(PDB) dunia Islam adalah sebesar US\$ 5,54 triliun pertahun atau setara dengan 9,14 persen GDP dunia. Untuk perbandingan GDP Uni Eropa atau AS adalah sekitar 12 triliun US\$. Selain itu total perdagangan di negara Muslim hanya 7 sampai dengan 8 persen dari perdagangan internasional. Sementara, angka perdagangan bilateral hanya 13 persen dari total perdagangan negara Muslim. Lebih spesifik, bisa dicontohkan di Indonesia misalnya, secara demografi umat Islam memang tergolong mayoritas yaitu hampir 90 persen dari jumlah penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Namun secara ekonomi umat Islam ternyata sangat lemah, karena hanya menguasai 20 persen sumber-sumber perekonomian.

Di sisi yang lain, data yang ada menyebutkan bahwa kurang dari 1 persen orang Islam di dunia terdapat dalam negara yang dikatakan berpendapatan tinggi, 5 persen di dalam negara yang berpendapatan sederhana tinggi, 28 persen dalam negara yang berpendapatan sederhana rendah dan 66 persen dalam negara yang berpendapatan rendah. Data OKI (Organisasi Konferensi Islam) juga menyebutkan, saat ini masih ada sekitar 24 persen dari populasi umat Islam di dunia yang berpenghasilan kurang dari satu dolar AS per hari dan sekitar 45 persen penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan.

Secara umum, negara-negara anggota OKI tertinggal dengan negara-negara lain dalam hal pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Menurut laporan terbaru yang dikeluarkan OKI, dari 57 negara anggota OKI hanya tiga negara yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang tinggi dan mampu mengeksport produk berteknologi maju, yaitu Turki, Mesir, dan Uzbekistan. Selain itu, saat ini negara-negara muslim pada umumnya berada dalam kemiskinan atau tertinggal dibandingkan dengan negara-negara barat. Ironisnya, terdapat negara yang secara legal formal menerapkan syariat Islam justru menjadi negara dengan kategori buruk di dunia.

Tolok ukur kemiskinan dan ketertinggalan dapat dilihat dengan menggunakan kriteria Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dikenal dengan *Human Development Index* (HDI). HDI adalah indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil-hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. HDI juga

mengartikan kesejahteraan secara lebih luas dari sekedar Pendapatan Domestik Bruto (PDB). HDI memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu; *pertama*, kesehatan (diukur dari usia harapan hidup); *kedua*, pendidikan (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan, dan tinggi); dan *ketiga*, standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Negara-negara di dunia diklasifikasikan dalam tiga golongan berdasarkan IPM mereka, yaitu tinggi, menengah, dan rendah. Batas nilai bagi negara maju adalah IPM diatas 0,800 (kategori tinggi), negara terbelakang mempunyai IPM 0,500 ke bawah (kategori rendah). Indonesia termasuk negara berkembang dengan nilai IPM 0,711 (kategori menengah).

**Tabel 1.1. Peringkat *Human Development Index* (HDI) Beberapa Negara Muslim**

Negara	2002		2005		2006	
	HDI (ke-)	GDP per kapita (US\$)	HDI (ke-)	GDP per kapita (US\$)	HDI (ke-)	GDP per kapita (US\$)
Brunai	33	19210	30	28161	34	19210
Bahrain	40	17170	41	21482	39	20758
Kuwait	44	16240	33	2631	33	19384
Qatar	47	19844	35	27664	46	19844
Emirat Arab	49	22420	39	25514	49	24056
Malaysia	59	9210	63	10882	61	10276
Arab Saudi	77	12650	61	15711	76	13825
Turki	88	6310	84	8407	92	7753
Iran	101	6690	94	7968	96	7525
Uzbekistan	107	1670	113	2063	113	1869
Indonesia	111	3230	107	3843	108	3609
Tajikistan	116	980	122	1356	122	1202
Mesir	120	3,810	112	4337	111	4211
Bangladesh	138	1820	140	2053	137	1870
Pakistan	142	1940	136	2370	134	2225

Nigeria	151	860	158	1128	159	1154
---------	-----	-----	-----	------	-----	------

Sumber: diolah dari UNDP Report

Dengan melihat pada sejumlah aspek yang paling fundamental dalam hidup dan kesempatan manusia, HDI memberikan suatu gambaran yang lebih lengkap mengenai pembangunan sebuah negara dibandingkan indikator-indikator lain, seperti GDP per kapita. Pada tahun 2002, dari 176 negara di dunia, tidak satu pun negara Muslim mendekati posisi negara-negara maju bilamana diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Yang tertinggi pencapaiannya adalah Brunei Darussalam pada posisi nomor 33. Negara Muslim yang paling berpengaruh di kawasannya seperti Arab Saudi dan Turki hanya menempati peringkat nomor 77 dan 88. Negara-negara Muslim berpenduduk besar seperti Indonesia, Mesir, Pakistan dan Bangladesh berada pada posisi yang jauh lebih rendah yaitu masing masing 111, 120, 138, dan 142. Lebih lanjut kondisi 2006 tidak pula menunjukkan perbaikan, posisi HDI untuk keempat negara tersebut masing-masing 108, 111, 134, dan 137. Daftar HDI selengkapnya di negara Muslim (anggota OKI) ditunjukkan dalam tabel L.3. pada lampiran (diolah dari *UNDP Report*).

Di satu sisi umumnya pemerintah negara-negara Muslim yaitu negara dengan konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam di dunia ini memiliki orientasi untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya terbukti melalui ditunjukkannya komitmen negara-negara Muslim tersebut dengan penandatanganan Deklarasi Milenium pada September 2000 dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) dimana pembangunan manusia ditempatkan sebagai fokus (perhatian utama). Sehingga MDGs mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang masih mempunyai tingkat kesejahteraan (HDI) rendah tentunya dengan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Salah satu tantangan kebijakan publik adalah mewujudkan negara kesejahteraan dan pemberantasan korupsi. Negara kesejahteraan adalah sistem yang memberikan peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan dana

publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker, 1988).

Korupsi (dalam bahasa Latin yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* sama artinya dengan busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok). Definisi yang sering dipakai (khususnya oleh lembaga *Transparency International*) yaitu perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas yaitu haram. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*Iqâmat al-'adâlah al-ijtimâ'iyah wa al-mashlahat al-'âmmah*).

Namun pada kenyataannya, korupsi tampaknya sudah menjadi fenomena di seluruh dunia. Tidak ada daerah atau negara yang bebas dari korupsi. Korupsi sudah membudaya dalam setiap aspek kehidupan masyarakat dan bukan semata-mata milik strata atas dalam jajaran pemerintahan. Berkaitan dengan persoalan ini, secara hierarki, korupsi dianggap sudah menjadi fenomena yang lekat mulai dari level instansi pusat hingga di tingkat daerah (lokal). Korupsi kelihatannya masih dipandang semata-mata sebagai besarnya pungutan tidak resmi dalam pengurusan suatu proses perijinan atau proses administrasi lainnya, sedangkan dalam pengertian yang lebih luas yakni setiap perbuatan yang merugikan perekonomian negara. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Korupsi merupakan salah satu penghambat terbesar perkembangan ekonomi dan manusia.

Korupsi merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan oleh lemahnya sistem administrasi di suatu negara (*bad administration*). Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi telah menyebabkan ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan kian terbuka serta masih banyak implikasi sosial lainnya (Syamsuddin, 2007). Secara lebih detail dapat dijelaskan, bahwasanya korupsi akan menyebabkan

berkurangnya penerimaan pajak dan melemahkan jiwa kewirausahaan, berkurangnya pengeluaran pemerintah, sehingga terjadi ketidaktepatan alokasi pada komposisi pengeluaran pemerintah. Dampak terakhirnya ialah akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dan mengganggu sistem jaminan sosial. Hal ini berarti akan berdampak terhadap semakin meningkatnya angka kemiskinan dengan makna lain mampu menurunkan kesejahteraan masyarakat (Chetwynd, 2003).

Fenomena yang ada sekarang menunjukkan kenyataan yang sungguh ironis, dimana negara-negara Muslim umumnya dinilai memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi yang tampak pada nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh lembaga Transparansi Internasional setiap tahunnya.

**Tabel 1.2. Peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK)  
Beberapa Negara Muslim**

Negara	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
Bangladesh	1.7
Turkmenistan	1.8
Cote d'Ivoire	1.9
Pakistan	2.1
Tajikistan	2.1
Azerbaijan	2.2
Indonesia	2.2
Uzbekistan	2.2
Kyrgyz Republic	2.3
Albania	2.4
Sierra Leone	2.4
Togo	2.4
Uganda	2.5
Kazakhstan	2.6
Benin	2.9
Iran	2.9
Mali	2.9
Algeria	3.1
Lebanon	3.1
Morocco	3.2
Maldives	3.3
Burkina Faso	3.4
Egypt	3.4
Turkey	3.5
Kuwait	4.7
Tunisia	4.9
Malaysia	5.1
Jordan	5.7
Bahrain	5.8

Oman	6.3
Brunei	u.p *)

Sumber : Laporan Lembaga Transparansi Internasional, Survey Tahun 2005

Survey tahun 2006 juga menunjukkan bahwa peringkat IPK negara-negara Muslim berada pada Indeks atas (skala kecil; dengan semakin tinggi atau besar angka skala, maka semakin bersih dari korupsi). Negara Irak, Indonesia, Iran, Mesir, Saudi Arabia dan Turki memiliki IPK secara berturut-turut 1.9, 2.4, 2.7, 3.3, 3.3, 3.8. Dapat disimpulkan dari data-data yang ada bahwa banyak para penguasa muslim, ketika berkuasa, melakukan tindak kejahatan korupsi yang luar biasa, sehingga mereka bisa hidup bersenang-senang sementara masyarakatnya harus hidup dengan menderita, dalam kesengsaraan dan kemiskinan.

Upaya mensejahterakan masyarakat merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Namun fakta (realita) yang ada peran dan fungsi pemerintah ini cenderung terhambat oleh adanya praktik korupsi yang dapat melemahkan ketahanan anggaran di masing-masing negara. Untuk mengetahui dampak korupsi ini terhadap tingkat kesejahteraan salah satunya ialah dengan mengamati sistem pengelolaan anggaran negara-negara Muslim tersebut, yaitu pada sisi penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah di negara-negara muslim yang melakukan praktik korupsi.

Di satu sisi yaitu dari pengelolaan anggarannya, nampak bahwa kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan hak-hak rakyat sangat terbuka. Berdasarkan laporan UNDP, walaupun beberapa negara Muslim seperti Tunisia, Arab Saudi, dan Mesir, memang memiliki anggaran untuk sektor pendidikan yang relatif besar, namun tetap saja secara umum sisi pengeluaran dari negara muslim untuk sektor kesejahteraan masyarakat masih sangat rendah, salah satunya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Indonesia misalnya, pada tahun anggaran 2002, pengeluaran pemerintah salah satunya untuk sektor pendidikan hanya sebesar 1,3 persen dari GDP dan untuk sektor kesehatan sebesar 0,6 persen dari GDP, Mesir hanya mengeluarkan 1,9 persen dari GDP untuk kesehatan, Turki mengeluarkan 3,7 persen dari GDP untuk pendidikan. Sementara di negara-negara maju seperti Belanda misalnya, alokasi pengeluaran untuk sektor pendidikan sebesar 5 persen

dari GDP dan kesehatan berkisar 5,7 persen GDP, Jepang sebesar 3,6 persen dari GDP untuk pendidikan dan sekitar 6,2 persen GDP untuk kesehatan, atau Kanada sebesar 5,2 persen dari GDP untuk pendidikan dan 6,8 persen GDP untuk kesehatan.

Selain permasalahan rendahnya sisi pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat, ternyata neraca keuangan mayoritas negara-negara Muslim adalah dalam keadaan defisit. Laporan *Islamic Development Bank* (IDB) tahun 2004 menunjukkan bahwa negara seperti Indonesia mengalami defisit US\$ 3470,6 juta pada tahun 1999, Mesir US\$ 3295,3 juta tahun 1997, Turki US\$ 22642,9 juta tahun 2000, Pakistan US\$ 3295,3 juta tahun 2000, dan Iran US\$ 980,8 juta pada tahun 2000. Data-data tersebut menunjukkan buruknya pengelolaan anggaran di negara-negara Muslim.

Dengan potensi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), dan sumber-sumber keuangan yang sangat besar, negara Muslim seharusnya mampu membangun kekuatan ekonominya untuk kebaikan dan kemashlahatan umat. Negara-negara Muslim seyogyanya mampu pula mengembalikan prinsip dan misi Islam sesungguhnya, yakni memerangi kemiskinan. Dalam banyak ayat dan hadits pula kita temukan betapa ajaran Islam menentang keterbelakangan, kebodohan, dan kemiskinan. Karena itu, kita berkeyakinan bahwa dengan diamalkannya ajaran Islam secara konsisten dan benar akan mempercepat proses modernisasi.

Dalam pemikiran Islam, Islam menginginkan setiap individu untuk memperhatikan kesejahterannya. Oleh karena itu yang mendasari kaum muslimin dalam beraktivitas adalah perintah agama untuk mencapai kesejahteraan yang berdimensi dunia akhirat. Semua aktivitas yang menuju arah kesejahteraan umat (*mashlahah*) disebut dengan kebutuhan, dan kebutuhan ini harus dipenuhi. Islam memandang kesejahteraan umat manusia dan terbebasnya dari penderitaan merupakan dasar dari syariah. Maka dalam konsep Islam, peran pemerintah melalui kebijakan fiskal diarahkan untuk menstimulus perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, sistem fiskal harus mendorong setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Dengan memanfaatkan data satu tahun terakhir yaitu tahun 2006, diharapkan mampu memberikan dukungan empiris pentingnya pemerintah memberikan perhatian pada permasalahan korupsi, pembangunan sosial umumnya, dan kesejahteraan masyarakat khususnya. Perhatian dalam hal ini utamanya dalam arti meningkatkan kemampuan untuk memberantas korupsi sampai dengan ke akar-akar permasalahannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan yang tepat guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

## **2. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian**

Negara-negara Muslim memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan keuangan yang cukup besar yakni terbukti memiliki cadangan minyak dunia yaitu di atas 73,6 persen cadangan dunia dan tingkat produksi lebih dari 42,9 persen produksi minyak dunia serta 50,1 persen dari cadangan gas alam dunia. Dari 25 negara produsen minyak terbesar di dunia yang menguasai kira-kira 91,2 persen produksi minyak dunia, 14 negara diantaranya adalah negara Muslim dengan kontribusi 42,9 persen produksi minyak dunia. Cadangan minyak dunia terbesar juga berada di 5 negara muslim (Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, dan Emirat Arab) serta dari 25 negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia yang kira-kira menguasai 96,5 persen cadangan minyak dunia, dimana 14 negara diantaranya juga negara Muslim dengan kontribusi 73,6 persen cadangan minyak dunia (*diolah dari Statistik OPEC, 2005*).

Selain itu, umumnya pemerintah negara-negara Muslim yaitu negara dengan konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam di dunia ini juga memiliki orientasi untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya terbukti melalui ditunjukkannya komitmen negara-negara Muslim tersebut dengan penandatanganan Deklarasi Milenium pada September 2000 dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) dimana pembangunan manusia ditempatkan sebagai fokus (perhatian utama). Sehingga, melalui MDGs tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara-negara yang masih mempunyai tingkat kesejahteraan (HDI) rendah serta

terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel telah menjadi kehendak bersama.

Target MDGs menjadi dasar perumusan strategi penanggulangan kemiskinan di seluruh negara anggota PBB, khususnya negara-negara berkembang, termasuk negara Muslim (Indrawati, 2005). Kehendak dan komitmen yang kuat dalam pencapaian MDGs yang diadopsi oleh negara-negara Muslim harus terimplemantasi dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya.

Sesuai konsep ekonomi Islam, pemerintahan Muslim di era modern saat ini seharusnya lebih mampu menjalankan prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Namun, pada kenyataannya, sampai saat ini mayoritas negara muslim belum secara maksimal mengimplementasikan hal tersebut.

Tingkat kesejahteraan yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) di negara Muslim tidak satu pun yang mendekati posisi negara-negara maju sampai dengan tahun 2006. Rata-rata dari 176 negara di dunia, yang tertinggi pencapaiannya adalah hanya Brunei Darussalam (*UNDP Report*).

Kenyataan di atas dimungkinkan oleh karena pemerintah belum mampu mengelola anggaran dengan baik terbukti dengan data-data yang ada bahwa negara-negara muslim umumnya dinilai memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi tampak pada nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diterbitkan oleh lembaga Transparansi Internasional setiap tahunnya. Survey tahun 2006 menunjukkan bahwa peringkat IPK negara-negara Muslim berada pada Indeks atas (skala 10 dengan semakin tinggi atau besar angka skala, maka semakin bersih dari praktik korupsi). Negara Irak, Indonesia, Iran, Mesir, Saudi Arabia, dan Turki memiliki IPK secara berturut-turut 1.9, 2.4, 2.7, 3.3, 3.3, 3.8. Dibandingkan dengan negara-negara non muslim yang memiliki indeks yang cukup bagus, seperti Singapura, Denmark, Swiss, dan Amerika Serikat dengan IPK 9.4, 9.5, 9.1, 7.3. Korupsi tampaknya sudah menjadi perilaku yang membudaya dan khususnya sudah mengakar di jajaran instansi pemerintahan.

Upaya mensejahterakan masyarakat adalah merupakan tugas dan tanggung

jawab pemerintah. Namun fakta yang ada fungsi pemerintah ini cenderung terhambat oleh adanya korupsi yang dapat melemahkan ketahanan anggaran di masing-masing negara. Nampak pada sisi alokasi pengeluaran (belanja) pemerintah, kecenderungan pemerintah untuk mengabaikan hak rakyat sangat terbuka. Selain besaran alokasi belanja pemerintah juga belum memprioritaskan sektor-sektor kesejahteraan rakyat, diduga adanya korupsi dalam anggaran pengeluaran negara.

Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan, seharusnya pemerintah negara Muslim mampu mengimplementasikan nilai-nilai Islam dengan baik sehingga bersih dari korupsi, dapat mengelola anggaran dengan baik serta mampu menciptakan kesejahteraan masyarakatnya, namun pada kenyataannya terjadi sebaliknya, IPK negara-negara muslim relatif rendah apabila dibandingkan dengan negara Barat. Terbukti pula adanya pengelolaan anggaran pemerintah cukup buruk serta peringkat HDI di negara-negara Muslim jauh tertinggal di bawah negara-negara Barat.

Dari rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dampak korupsi melalui instrumen kebijakan fiskal terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara muslim?
2. Bagaimanakah tingkat kesejahteraan masyarakat di negara Muslim yang tingkat korupsinya tinggi dibandingkan dengan negara Muslim yang tingkat korupsinya rendah?

### **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara muslim melalui instrumen kebijakan fiskal.
2. Menganalisis perbandingan tingkat kesejahteraan masyarakat di negara Muslim yang tingkat korupsinya tinggi dengan di negara Muslim yang tingkat korupsinya rendah.

#### 4. Batasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada analisa dampak korupsi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM merupakan *proxy* dari kesejahteraan masyarakat. Dengan indeks tersebut akan digambarkan posisi suatu negara apakah termasuk kategori sejahtera (maju) atau tidak sejahtera (miskin). Data IPM yang digunakan dalam penelitian ini ialah data tahun 2006.

Tingkat korupsi suatu negara diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dikeluarkan oleh lembaga Transparansi Internasional setiap tahunnya. pengukuran korupsi menggunakan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Semenjak tahun 1995, lembaga Transparansi Internasional telah menerbitkan indeks tersebut yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Selain itu digunakan pula data keuangan atau anggaran pendapatan dan belanja di masing-masing negara tahun 2006 yang dikeluarkan Bank Dunia, IDB (*Islamic Development Bank*), dan UNDP (*United Nations Development Programme*).

Dalam penelitian ini negara muslim yang diteliti adalah negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam) yang merupakan negara Muslim. "Negara Muslim" di sini diartikan sebagai negara yang konstitusional Islam atau mayoritas penduduknya Islam. Semua negara muslim dapat bergabung dalam OKI. OKI merupakan organisasi internasional non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 (12 Rajab 1389 H). OKI memiliki 57 (lima puluh tujuh) negara anggota. Namun terdapat beberapa negara yang data-data keuangan negaranya tidak dipublikasikan secara internasional dan di sisi lain terdapat beberapa negara Muslim yang tidak diketahui Indeks Persepsi Korupsi (IPK)nya. Oleh karena itu, dengan keterbatasan tersebut, dari ke-57 negara tersebut, negara Muslim yang diteliti menjadi 31 (tiga puluh satu) negara, yaitu Bangladesh, Turkmenistan, Cote d'Ivoire, Pakistan, Tajikistan, Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali, Algeria, Lebanon, Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt,

Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, dan Brunei Darussalam.

## 5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel di dalam penelitian yaitu secara umum terdiri dari variabel korupsi, instrumen fiskal, dan kesejahteraan masyarakat. Proses penelitian ini dimulai dengan melihat dampak korupsi melalui kebijakan fiskal dalam hal ini penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di dua kelompok negara muslim, yaitu kelompok negara Muslim yang relatif tingkat korupsinya rendah dan kelompok negara Muslim yang tingkat korupsinya relatif tinggi. Untuk selanjutnya dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat di kedua kelompok tersebut.

Islam merupakan kerangka acuan yang *"kaffah"*, mempunyai cakupan pengertian yang luas, tidak hanya berkaitan dengan permasalahan ibadah, tetapi juga muamalat (kehidupan sehari-hari), akidah dan syariah, kebudayaan dan peradaban. Islam tidak saja berkaitan dengan masalah akhirat, tetapi juga masalah dunia, tidak hanya masalah agama namun juga masalah negara.

Syariah dan pemerintah merupakan dua faktor penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Islam, yang dimaksud kesejahteraan adalah bukan semata-mata diperoleh dari kekayaan material, yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi juga kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat (Sairi, 2005).

Salah satu tantangan kebijakan publik adalah mewujudkan negara kesejahteraan dan pemberantasan korupsi. Negara kesejahteraan adalah sistem yang memberikan peran lebih besar kepada negara untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker, 1988).

Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi serta peningkatan pendapatan perkapita (Bank Dunia, 2001).

Di lingkungan dunia Islam, pemerintah tentunya memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah, yang disesuaikan dengan jumlah pendapatannya. Pengeluaran pemerintah sebagai bagian dari instrumen fiskal berperan utama menstimulus perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat. Pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman terhadap Islam dan kesejahteraan masyarakat muslim. Selain itu sisi penerimaan anggaran ikut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pengeluaran pemerintah. Negara bertanggung jawab untuk melindungi agama warga negara, kehidupan, keturunan, dan harta milik. Peranan kebijakan fiskal sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas perekonomiannya.

Korupsi adalah fenomena di seluruh dunia. Istilah korupsi secara literal juga tidak dikenal dalam khasanah Islam klasik. Hal ini wajar karena memang korupsi adalah istilah kontemporer yang diserap dari bahasa Latin. Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka (definisi dari lembaga Transparansi Internasional).

Korupsi adalah penghambat terbesar perkembangan ekonomi dan manusia. Korupsi merupakan salah satu akibat yang ditimbulkan oleh lemahnya sistem administrasi di suatu negara (*bad administration*) (Karim, 2007). Korupsi kelihatannya masih dipandang semata-mata sebagai besarnya pungutan tidak resmi dalam pengurusan suatu proses perijinan atau proses administrasi lainnya, sedangkan dalam pengertian yang lebih luas yakni setiap perbuatan yang merugikan perekonomian negara. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi (Dewi, 2002). Korupsi telah menyebabkan ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat, kemiskinan kian terbuka, dan angka pengangguran kian melambung tinggi serta masih banyak implikasi sosial lainnya.

Di sisi yang lain, pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas

yaitu haram (dilarang) karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*Iqâmat al-'adâlah al-ijtimâ'iyah wa al-mashlahat al-'âmmah*).

Dalam pandangan Islam, uang negara yang bersumber dari rakyat pada hakikatnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada negara untuk dibagi-bagikan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi apapun. Setiap rupiah dari uang rakyat atau pajak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah (di akhirat nanti) dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat (di dunia ini).

Selain itu, Al-Qur'an menegaskan kewajiban berperilaku jujur dan benar atas setiap muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. At-Taubah: 119):



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar".

Dalam ayat yang lain, juga disebutkan:



Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

*daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak membawa keberkahan dan kemaslahatan bagi umat. Upaya mensejahterakan masyarakat merupakan tanggung jawab utama pemerintah melalui instrumen fiskalnya (penerimaan dan pengeluaran pemerintah), namun nyatanya kesejahteraan masyarakat belum juga optimal khususnya di negara-negara Muslim. Fakta yang ada fungsi pemerintah ini cenderung terhambat oleh adanya praktik korupsi, tentunya korupsi yang mampu melemahkan ketahanan anggaran di masing-masing negara. Hal ini terindikasi oleh adanya korupsi yang terjadi secara meluas di kalangan instansi pemerintahan.

Untuk mengetahui dampak korupsi ini terhadap tingkat kesejahteraan ialah melalui dua cara yaitu pertama, dengan melihat peran pemerintah melalui kebijakan fiskal (penerimaan dan pengeluaran/belanja pemerintah) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di dua kelompok negara, yaitu kelompok negara yang tingkat korupsinya relatif tinggi dan kelompok negara yang tingkat korupsinya relatif rendah. Cara kedua ialah dengan menganalisa tingkat kesejahteraan di kedua kelompok negara tersebut.

Uraian di atas merupakan penjabaran dari kerangka pemikiran pada penelitian ini yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Korupsi

Kesejahteraan  
Pengeluaran Pemerintah

Penerimaan Pemerintah

### **Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran**

## 6. Hipotesis Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisa dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di beberapa negara Muslim. Dengan demikian maka hipotesis yang dapat di susun adalah (1) Diduga korupsi berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan (2) Diduga tingkat kesejahteraan masyarakat di negara yang tingkat korupsinya tinggi adalah lebih rendah dibandingkan dengan negara yang tingkat korupsinya rendah.

## 7. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak korupsi di negara-negara muslim terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Obyek atau sampel dalam penelitian ini adalah 31 negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam).

Proses penelitian ini dimulai dengan membagi ke 31 (tiga puluh satu) negara tersebut dalam dua kelompok negara berdasarkan tingkat (indeks) korupsinya, yaitu pertama, kelompok negara dengan tingkat korupsinya relatif tinggi (memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kurang dari tiga (*Transparency International*, 2007)), terdiri dari 17 (tujuh belas) Negara (Bangladesh, Turkmenistan, Cote d'Ivoire, Pakistan, Tajikistan, Azerbaijan, Indonesia, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Albania, Sierra Leone, Togo, Uganda, Kazakhstan, Benin, Iran, Mali). Kelompok kedua ialah negara yang memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah (memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) lebih dari atau sama dengan tiga (*Transparency International*, 2007), meliputi 14 (empat belas) negara, yaitu meliputi Algeria, Lebanon, Morocco, Maldives, Burkina Faso, Egypt, Turkey, Kuwait, Tunisia, Malaysia, Jordan, Bahrain, Oman, dan Brunei Darussalam.

Setelah negara-negara tersebut dikelompokkan, maka cara untuk mengetahui dampak korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat ialah dengan menganalisa pengaruh dan peran pemerintah yaitu melalui instrumen fiskalnya (penerimaan dan pengeluaran pemerintah) terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di kedua kelompok negara tersebut. Selanjutnya dianalisa dengan membandingkan tingkat

kesejahteraan di kedua kelompok negara tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur yang mencakup kajian teori, penelitian sebelumnya, dan model yang berkaitan dengan masalah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data.

Variabel-variabel yang digunakan terdiri atas tingkat korupsi, pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Proses estimasi didasarkan pada analisis model persamaan struktural (*Structural Equation Models*) yang bertujuan secara umum untuk mengidentifikasi apakah ada hubungan atau korelasi antara korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di negara-negara muslim. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program Excell, SPSS dan AMOS.

## **8. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang berisi sebagai berikut: BAB I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah adalah informasi yang relevan untuk membantu menemukan pokok permasalahan berangkat dari sesuatu yang umum kepada hal yang khusus. Perumusan masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II Landasan teori dan Studi Literatur. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan topik tesis. Pada bab ini juga disertakan pembahasan mengenai hasil studi terdahulu untuk dilakukan perbandingan metodologi penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian dan Data. Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana penelitian yang dilakukan akan dilaksanakan secara operasional, terdiri

atas variabel penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metodologi analisis yang digunakan, dasar dari model ekonometrika yang digunakan serta uraian mengenai data yang digunakan.

BAB IV. Analisa dan Pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari data yang telah diolah. Hasil dari regresi (output) diuji dan dianalisis secara statistik. Hasil analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

BAB V. Penutup. Sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis yang memuat kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Sedangkan saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

